



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
KOMISI VI DPR RI  
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI BUMN RI**

- Tahun Sidang : 2024-2025  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- : 6 (Enam)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 2 September 2024  
Waktu : Pukul 10.56 s.d. 12.22 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI  
Gd. Nusantara I Lt. 1  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
- Ketua Rapat : Aria Bima  
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PDIP)
- Acara : Pembahasan terkait:  
1. Rencana Kerja dan Anggaran  
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025  
(Pagu Anggaran);  
2. Pelaksanaan Realisasi Anggaran sampai dengan  
Triwulan II Tahun Anggaran 2024;  
3. Permasalahan PT. Indofarma Tbk; dan  
4. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.  
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**  
26 dari 54 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (F-PDIP)**

5 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Adisatrya Suryo Sulisto, S.E., M.B.A.
3. Sonny T. Danaparamita
4. Sondang Tiar Debora Tampubolon
5. Dr. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-P.GOLKAR)**

6 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.

3. Ir. H. Mohamad Idris Laena
4. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M.
5. Doni Akbar, S.E., M.M.
6. Drs. Dadang S. Muchtar

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P.GERINDRA)**

4 dari 7 orang Anggota

1. Mohamad Hekal, M.B.A.
2. Andre Rosiade
3. Ir. H. La Tinro La Tunrung

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P.NASDEM)**

3 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
3. H. Subardi, S.H., M.H.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

1 dari 6 orang Anggota

1. Siti Mukaromah, S.Ag, M.A.P.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muslim, S.H.I, M.M.
3. Hj. Melani Leimena Suharli
4. Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Coom., M.Sc

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

1 dari 4 orang Anggota

1. Hj. Nevi Zuairina

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Jon Erizal, S.E., MBA.
2. Abdul Hakim Bafagih
3. Eko Hendro Purnomo, S,Sos.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

0 dari 2 orang Anggota

-

**B. UNDANGAN/PEMERINTAH:**



Menteri BUMN RI (Erick Thohir) beserta jajaran

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Republik Indonesia Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025, Senin 2 September 2024.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Om swastiastu,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi VI DPR RI,  
Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri BUMN,  
Bapak Erick Thohir beserta seluruh jajarannya,**

Puji syukur kita panjatkan ke 65hadirat Allah *Subhanahu Wa Taala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN pada hari ini tentunya dalam keadaan sehat.

Marilah kita hening sejenak, ada salah satu kawan kita yang meninggal dunia kemarin, Bapak Nyat Kadir. Marilah kita doakan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, semoga arwah beliau diterima di sisi-Nya, seluruh amal baiknya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing untuk kawan, sahabat kita, Pak Nyat Kadir, berdoa mulai.

**(BERDOA)**

Selesai.

**Bapak-Ibu dan hadirin yang kami muliakan,**

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI, rapat kerja hari ini telah dihadiri 7 fraksi. Perkenankan saya untuk membuka dan pada saat nanti kita mengambil keputusan, kita akan menunggu kuorum anggota. Hari ini telah dihadiri tanda tangan ada 13 anggota dengan 3 orang izin, maka perkenankan saya untuk membuka rapat pada pagi hari ini, rapat saya buka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.56 WIB)**



### **(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini. Sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini untuk membahas:

1. Mengenai Pembahasan RKA-KL Tahun Anggaran 2025 dari Pagu anggaran;
2. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan ke-2 tahun anggaran 2024;
3. Hal-hal yang terkait dengan masalah faktual.

Nanti ditambahkan saja, Pak, setelah penjelasan mengenai Indofarma dan juga beberapa rapat dengar pendapat umum kemarin juga masalah terkait dengan pensiunan Jiwasraya, nanti ditambahkan saja sebagai respon kami yang perlu kami sampaikan kepada Kementerian BUMN untuk diberikan penjelasannya. Indofarma, ya, terkait Indofarma dan pensiunan Jiwasraya.

Untuk itu kami ingin mendapatkan persetujuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apakah rapat pada hari ini ini kita bisa akhiri pukul 1 ya, setuju ya, pukul 1, kalau bisa lebih cepat.

### **(RAPAT: SETUJU)**

#### **Bapak-Ibu dan Saudara sekalian,**

Berdasarkan Nota Keuangan beserta RAPBN tahun 2025 Pagu Anggaran Kementerian BUMN tahun 2025 adalah sebesar 277.498 miliar yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar 197.404 miliar, ini *kan* cara nulisnya ini *kan*, koma saja, 197,404 miliar dan program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar 80,093 miliar. Nilai tersebut dengan Pagu Indikatif Kementerian BUMN tahun 2025 yang telah dilakukan pembahasannya pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN pada tanggal 7 Juni 2024 lalu.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi VI DPR RI juga telah menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN tahun 2025 sebesar 66,44 miliar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas yang belum terakomodir. Selain pembahasan RK, RKA Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2025, pada rapat kerja kali ini, Komisi VI DPR RI juga ingin mengetahui realisasi anggaran Kementerian BUMN sampai dengan Triwulan ke-2 tahun anggaran 2024. Untuk itu, dalam rapat kerja hari ini diharapkan terdapat gambaran terkait rencana kerja anggaran dan prioritas program Kementerian BUMN untuk tahun anggaran 2025 serta progres penyerapan anggaran dan kinerja kementerian sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Untuk memberi singkat waktu, kami mempersilakan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya, waktu dan tempat kami persilakan.



**MENTERI BUMN RI (ERICK THOHIR):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Shalom,*  
*Om swastiastu,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan,

Pertama-tama kami dari Kementerian BUMN ingin mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya Bapak Nyat Kadir, yang kita mengenal figur beliau adalah figur yang tentu nyaman memberikan juga pemikiran-pemikiran yang *solutif* dan juga figur yang saya rasa mudah diajak untuk bekerja sama. Karena itu kami juga ingin mengucapkan turut berduka cita yang mendalam kepada Partai Nasdem tentunya dan *Insya Allah* tentu kepulangan beliau sendiri merupakan bagian dari perjalanan yang selama ini kita bisa maksimalkan untuk peningkatan kinerja masing-masing tupoksi yang sudah berjalan selama ini. Jadi sekali lagi, kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam.

Tentu untuk mengenai pagu anggaran, kita mengetahui pagu awal anggaran ini sebesar 308 miliar dan tentu ada *automatic adjustment* dari Kementerian sehingga menjadi 284,36 dan *alhamdulillah* kita terus mendorong realisasi. Kalau kita lihat rata-rata realisasi kita nanti di penutup tahun, biasanya kurang lebih di 98-99%. Hari ini kita sudah secara *cash basis* kurang lebih di 42,11% yaitu 119,75 miliar. Adapun kalau *actual basis*-nya itu kurang lebih hampir di 169, jadi trennya kita masih positif di akhir tahun kita bisa menyerap di atas 90-an.

Dan kita lihat di sini tentu di *slide* berikutnya, kita juga tetap berharap, karena untuk Pagu Anggaran 2025 ya tentu kita berharap dari Komisi VI bisa mendorong kembali dan kami juga dari Kementerian BUMN akan coba berkomunikasi kepada Menteri Keuangan, di mana pagu daripada *adjustment* tahun 2024 itu 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di Pagu Anggaran 2025 ini hanya 277 miliar, ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang kita sudah jalankan selama ini.

Dan kami berharap, tentu ada usulan tambahan sekitar 66 miliar, sehingga kurang lebih angkanya menjadi 344 miliar, karena tidak lain dari angka 66 miliar ini juga memang sangat terlalu kecil dibandingkan prestasi yang memang Komisi VI sudah dorong untuk kepada kami dan kami harapkan juga ada kebijaksanaan dari Kementerian Keuangan. Dan angka 66 miliar ini tidak lain kita ingin terus meningkatkan sistem daripada pengawasan yang selama ini tentu kalau kita lihat, ini salah satu yang terus kita bisa perdalam dan perbaiki ke depannya. Dan tentu kita berharap pada bulan Oktober ini mungkin ada tanggapan, saya dengar hari ini juga ada Rapat Banggar yang akan mendiskusikan, jadi kembali mohon dukungannya agar bisa terlaksana.

Dan kalau kita lihat juga dari tadi kita coba perbandingkan *apple* dan *to apple* ya, kalau memang ternyata ini turun dari 284 ke 277, sedangkan kinerja dividen ini tentu meningkat secara tertata, artinya memang *comparison*-nya ini sangat tidak berimbang. Dan kalau kita lihat juga Pagu Anggaran 2025, di sini jelas itu ada gaji dan tunjangan sebesar 28,26% atau 78 miliar lebih, lalu juga ada operasional kantor sebesar 76, eh 71,62 miliar kurang lebih 25%, lalu anggaran kesekretariatan yang mendukung pembinaan BUMN yaitu 47,35 atau 17% dan pengembangan dan pengawasan BUMN yaitu ini yang salah satu kita tingkatkan menjadi 80 miliar yaitu 28,86%.

Untuk kinerja sendiri, tentu tidak lain tadi saya sudah sampaikan terima kasih daripada pendampingan, penekanan, dan juga solusi-solusi yang diberikan. Bahwa selama tahun 2020 sampai 2023, total kontribusi Kementerian BUMN kepada negara yaitu, senilai 1.940 triliun, di mana ini kumulatif dari tahun 2020 sampai 2023. Di mana pajak sendiri, itu 1.391,4 triliun, lalu PNBPN dan lainnya itu 354,2 triliun dan dividen sebesar 194,4 triliun. Kalau kita lihat, tentu kontribusi perpajakan kita bisa terus meningkat karena tidak lain memang tentu berupa dari pajak dan lain-lain, yang memang kinerja perusahaan sendiri membaik dan *alhamdulillah* kalau kita lihat dari tahun 2022 di sekitar 410 triliun lalu meningkat menjadi 223, eh 2023 menjadi 457 triliun.

Adapun PNBPN, ini ada penurunan karena memang fluktuasi harga daripada sumber daya alam yang memang ada koreksi sendiri, apakah itu di kelapa sawit, di batu bara, dan lain-lainnya. Tetapi kita juga bisa melihat, dividen ini di tahun 2023 adalah di angka 81 triliun, setelah kita ada *swing* sebenarnya, ketika di tahun 2021-2022 ini tentu penurunan karena ada Covid waktu itu, jadi ada *swing*-nya, tapi di situ *double* di tahun 2023.

Dan tentu ini, *slide* berikutnya, kalau kita lihat kontributor dividen tahun 2024 sendiri, tentu ada pengembangan seperti yang diarahkan kepada kami dari Komisi VI, jangan hanya Himbara, tetapi di sini MIND ID, Pertamina, ini menjadi suatu kontribusi lain dan tentu yang lainnya seperti Telkom, itu kalau kita lihat, sudah memberikan kontribusi juga seperti untuk menambah daripada dividen yang ada.

Dan tentu Kalau kita catat juga, PMN ini memang ada angkanya signifikan 217, tetapi tentu catatan bahwa 90% ini untuk penugasan dan banyak juga dari angka-angka ini kita melakukan percepatan pembangunan di sektor infrastruktur dan lain-lainnya. Dan tentu ini yang mungkin kita harapkan juga detail daripada angka-angkanya, bahwa total aset itu tumbuh dari 8.312 triliun menjadi 10.400 triliun. Dan tentu hal ini yang menjadi penekanan bahwa pertumbuhan aset ini salah satunya ketika kita membawa ke publik banyak perusahaan BUMN, jadi tentu ada valuasi yang meningkat. Jadi tidak hanya dilihat *apple to apple* yaitu aset yang ada saja, tetapi tentu karena kita bawa ke publik, tentu aset ini menjadi sebuah apresiasi yang meningkat.

Lalu juga yang perlu ditekankan, mengenai total ekuitas. Total ekuitas kita sekarang sudah ada di angka 3.444 triliun, artinya *equity* kita ini menjadi sebuah fondasi yang kuat untuk kita juga bersaing ke depannya.

Di *slide* berikutnya, tentu ini juga menggembirakan, di mana *return on asset* kita yang tadinya hanya sekitar 0,2%, sekarang itu sudah di angka kurang lebih 3% lebih. Nah, ini saya rasa rata-rata *benchmarking* dengan banyak perusahaan juga kita menjadi hal yang positif, lalu *return on equity* yang tadinya juga hanya 0,5% ini sekarang tumbuh di sekitar 10%-an jadi saya rasa *benchmarking* yang baik juga dengan, untuk banyak pihak ini.

Lalu *debt to EBITDA*, ini kita berhasil menurunkan yang tadinya 4,3 kali menjadi 2,4 kali, jadi *debt to EBITDA*, sedangkan *total liability to equity* kita dari 2,4 ini menjadi 2 jadi sudah ada penurunan 0,4%. Pendapatan ini naik dari 1.930 menjadi 2.933 triliun, ini tidak lain juga kita lihat, kita mengembangkan banyak pendapatan baru yang tidak hanya berdasarkan sumber daya alam, ya, banyak inovasi-inovasi yang berhasil, seperti contohnya mungkin kalau di Himbara itu sekarang basis daripada digital seperti Livin', Brimo dan lain-lainnya, ini sebuah *income* yang bisa menjadi pertumbuhan baru, selain tentu hal-hal yang kita coba dorong di segi-segi positif lainnya.

Dan laba bersih itu meningkat, sekarang ini di angka 327 triliun. Dan saya rasa ini bagian kinerja yang selama ini tentu dari Komisi VI mendorong kami untuk *performance* dijaga. Sedangkan untuk tambahan lain-lainnya, mengenai Indofarma dan Jiwasraya, mungkin Pak Wamen bisa menambahkan, nanti juga saya ikuti, silakan.

#### **WAKIL MENTERI BUMN RI (KARTIKA WIRJOATMODJO):**

Terima kasih, Pak Menteri.

#### **Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI dan Anggota Komisi VI,**

Sesuai tadi beberapa isu yang mengemuka di masyarakat, kami menambahkan bahwa untuk kasus Indofarma, saat ini memang ada *fraud* yang sedang ditangani oleh Kejaksaan dan kami baru menyelesaikan PKPU yang menghasilkan homologasi. Memang nanti kami merencanakan Indofarma ini akan menjadi perusahaan yang istilahnya *made order*, Pak, maklon, Jadi nanti dia tidak lagi memproduksi independen, tapi *made order* atau maklon, di mana nanti mereka ada pesanan dari Biofarma dan mereka memproduksi. Untuk itu mereka akan melakukan efisiensi, sehingga nanti untuk pegawai, kita sedang menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian supaya makin efisien ke depan.

Nah, untuk Jiwasraya memang, Jiwasraya ini dalam konteks sebagai pendiri dari DPPK Jiwasraya memang pada waktu PMN dulu *scope*-nya itu untuk menyelesaikan polis. Nah, oleh karena itu nanti dalam proses likuidasi yang kami sedang dorong bersama-sama dengan OJK, ini memang tim



likuidasi yang akan memberikan pembagian sisa aset dan sisa *cash*-nya, mana yang kepada pemegang polis yang tidak ikut restru, mana yang untuk menambah kekurangan di DPPK yang akan didanai untuk pegawai, jadi nanti akan kami proses melalui tim likuidasi yang akan bekerja bersama-sama dengan OJK.

Demikian, Pak Menteri, terima kasih.

**MENTERI BUMN RI (ERICK THOHIR):**

Saya *barusan* mendapat info rupanya sudah diketok oleh Banggar untuk dividen tahun 2025 kami ditargetkan 90 triliun, jadi ada peningkatan dari 85 menjadi 90 triliun, saya rasa angka yang fantastis. Ya kita bekerja keras, tapi mohon, saya rasa dukungan daripada penunjang kami untuk bagian BUMN juga kalau bisa, mohon ditingkatkan, hanya 66 miliar sebenarnya dibandingkan 5 triliun peningkatan, jauh sekali.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih kepada Menteri BUMN yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan maupun masukan terhadap penjelasan yang telah disampaikan oleh Menteri BUMN.

Dari daftar penanya yang ada, ada Pak Andre Rosiade, ada Pak Jon Erizal, ada Pak Harris Turino, Pak Sonny, kemudian sebelah kiri itu Ibu Nevy, Ibu Melani, Pak Abdul Hakim, dan Pak Muslim. Kami persilakan. Pak Andre Rosiade.

**F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE, S.E.):**

Baik, Mas Bimo, terima kasih.

**Pimpinan, Mas Bimo dan Pak Haikal, Pak Martin, dan seluruh teman-teman Anggota Komisi VI semuanya, Yang kami hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajarannya,**

*Innalillahi wa innaillahirajiun* tentu, kita berduka, senior kita sudah mendahului kita semua, Pak Nyat Kadir, *Insya Allah* kita doakan beliau *husnul khatimah, Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Baik, ada berapa hal, Pak Menteri, *wabil khusus* soal dapil ya, Sumatera Barat ya, yang pertama seperti kita ketahui berapa waktu yang lalu kami menyampaikan aspirasi dari Rumah Sakit M.Jamil yang meminta bisa membeli lahan KAI yang ada di kota Padang, di mana Rumah Sakit M. Jamil ini rumah sakit milik Kementerian Kesehatan yang memang menampung



masyarakat di Sumatera Barat, lalu sebagian Jambi, Bengkulu, maupun Sumatera Utara. Nah, dengan rencana pembelian tanah KAI ini, akan ada tambahan 15.000 pasien baru. Nah, *alhamdulillah* Pak Menteri sudah memberikan persetujuan, kami mengapresiasi, jadi usulan dari Rumah Sakit M. Jamil ini sudah untuk membeli tanah KAI ini sudah disetujui oleh Pak Menteri. surat keputusannya sudah Bapak tanda tangani. Nah, tinggal soal metodologi pembayaran. Nah saya mendengar jadi, Pak, Om, Om, jangan kencang-kencang, Om.

Jadi saya menyampaikan aspirasi berapa waktu yang lalu, bahwa M. Jamil, Rumah Sakit M. Jamil ingin mencicil kepada KAI, *alhamdulillah* juga saya dengar. bahwa ada peraturan menteriya boleh mencicil. Mungkin karena Pak Menteri sudah menugaskan ke Pak Rabin, boleh mungkin Pak Rabin bisa menjelaskan sedikit. Minta izin, Mas Bimo, 30 detik, supaya apa? Ini kejelasan bagi masyarakat Sumatera Barat karena memang ini sangat dibutuhkan.

Izin ya, Mas Bimo, 30 detik *dijelasin* Pak Rabin, boleh ya, silakan. Pak Menteri izin, Pak Rabin bisa menjelaskan.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN RI (RABIN INDRAJAD HATTARI):**

Terima kasih, Pak Andre.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE, S.E.):**

*Walaikumsalam,*

**SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN RI (RABIN INDRAJAD HATTARI):**

Jadi, untuk M. Jamil, Pak Andre, minggu lalu kita sudah ketemu dan yang sekarang dibutuhkan adalah dari M. Jamil untuk kirim surat ke KAI untuk permintaan pencicilan tersebut, nah setelah itu baru dikirim dari KAI dikirim ke kami, nah ini sekarang tinggal proses administrasinya, Pak Andre.

**F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE, S.E.):**

Oke.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN RI (RABIN INDRAJAD HATTARI):**

Terima kasih dan persetujuan dari Pak Menteri.

**F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE, S.E.):**

Baik, terima kasih Pak Rabin, terima kasih Pak Menteri. Berarti selain disetujui dijual ke M. Jamil, *alhamdulillah* aspirasi M. Jamil bahwa

pencuilannya pun disetujui, tinggal soal administrasi, terima kasih Pak Rabin dan Pak Menteri, itu yang pertama.

Yang kedua juga, Pak Menteri, tadi saya juga sudah menyerahkan surat ke Pak Menteri dari Rektor Unand, Rektor Universitas Andalas yang ingin beraudiensi dengan Pak Menteri dan *alhamdulillah* sudah dijadwalkan oleh Pak Menteri tanggal 11 Oktober, terima *eh*, 11 September ini, itu yang kedua.

Yang ketiga, Pak Menteri, terakhir ini. Pak Menteri, kita tahu bahwa ada beban di Utama Karya, Waskita, dan juga Jasa Marga, soal tekanan soal gardu tol MLFF ini, Pak Tiko. Dan saya ingin, kita sudah dengar ada pernyataan dari BPK maupun BPKP bahwa MLFF *odong-odong* ini tidak layak dilaksanakan, ya, karena memang tidak dibutuhkan. Nah, Pak Menteri, saya sudah langsung bertanya kepada BUMN-BUMN seperti Utama Karya dan Jasa Marga yang menjadi ujung tombak pengelola tol dan pemilik tol di Indonesia, bahwa mereka sebenarnya bisa tidak lagi pakai *tap* ya, jadi pintu tol itu tanpa *tap* ya. Bisa dua hal, yang pertama kan Jasa Marga sudah punya RFID yang diproduksi oleh JMTM, yang kedua juga, bisa saja Jasa Marga, Utama Karya, dan Asosiasi Tol Indonesia, itu bekerja sama dengan Himbara untuk pasang OBU.

Nah, menurut saya, Pak Menteri, supaya MLFF *odong-odong* ini tidak ditekan terus BUMN-BUMN kita, kenapa tidak Pak Menteri BUMN berinisiatif saja, ya, mengambil inisiatif, menunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat, bahwa BUMN, BUMN kita sudah bisa tanpa *tap* ya, memang alatnya sudah bisa. Tinggal sebenarnya ini sederhana, BPJT bersurat ke BUJT, ya, BPJT dari Kementerian PUPR itu, bersurat ke BUJT, memerintahkan BUJT, silakan jangan lagi pakai *tap*, nah BUJT diserahkan mandiri, bagaimana caranya. Saya rasa kalau Pak Menteri membantu mengkomunikasikan dan memerintahkan, saya rasa bulan depan seluruh pintu tol BUMN kita sudah bisa tanpa *tap*.

Jadi ini usulan saya, Pak Menteri, supaya kita enggak ada beban lagi MLFF *odong-odong* ini harus dipaksakan terus itu *loh*, *kan* kasihan ini bermasalah, terindikasi kerugian negara, lalu direksi-direksi ini ditekan, ditekan, ditekan terus *gitu*. Akhirnya apa? *Kan* direksi juga mau pensiun tenang. Nah, Pak Menteri mungkin bisa mengambil inisiatif bahwa kalau mau tidak pakai *tap* ya *enggak* apa-apa, kita dukung tanpa *tap*, tapi pakai teknologi yang ada tanpa perlu kita beli teknologi *odong-odong*.

Terima kasih, Pak Menteri, Pimpinan, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Selanjutnya kami persilakan, Ibu Nevi.

**F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):**



Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota dan Komisi VI yang kami hormati,  
Pak Menteri bersama jajaran,**

Yang pertama, Pak Menteri, pemerintah sudah ketuk palu tadi, Pak, ya, untuk di untuk, apa namanya, tadi 95, 90 triliun ya, ya PMN tahun 2025, angka, apakah, *eh* dividen, dividen ya, PMN-nya berapa, Pak? 86 ya? 84, ketuk palunya ya? 84 ya, eh 44 ya, 2025, iya 44.

Nah ini, Pak, pastikan apakah angka ini realistis, Pak, untuk mendapatkan PMN sebesar 44 triliun. Kita tahu, Pak, sebetulnya kita ingin, Pak, dengan PMN yang diberikan oleh pemerintah ini *kan* investasi pemerintah untuk BUMN, Pak, kalau bisa *tuh* seperti ada laporan berkala efektivitasnya, volumenya, terus kinerjanya, *multiplier* efeknya, indikator-indikator kerjanya, itu kalau bisa jelaskan, kami bahas kemarin di Banggar seperti itu, Pak. Jadi indikator kerja PMN setiap tahun itu kalau bisa kami dapatkan, tidak hanya angka-angka tadi yang Bapak sebutkan saja, nah sehingga dengan PMN 2025 ini *kan* tadi 44 triliun ya, Pak, ya, itu Pak, dengan adanya ekonomi global yang sekarang tidak pasti dan juga ditambah dengan pemerintahan baru, Pak, dan juga nanti mungkin bisa jadi adanya pergantian pejabat di BUMN, nah, apakah ini akan berpengaruh terhadap kinerja BUMN ini, Pak? Walaupun mungkin angkanya tidak terlalu besar, 44 triliun, tapi tetap itu adalah investasi negara ya melalui BUMN.

Pak, tadi kita sudah dengar cerita tentang Indofarma, jadi kami khawatir, Pak, kasus Indofarma ini bagaikan gunung es di BUMN, ini yang kami khawatirkan. Dan apakah Kementerian BUMN ada melakukan audit berkala terhadap seluruh perusahaan BUMN yang ada? Saya khawatir nanti ada lagi BUMN yang lain seperti Indofarma ini ya, kami tidak ingin terjadi lagi.

Lalu selanjutnya, tentang dengan Jiwasraya seperti itu, Pak, tolong dipastikan, sebelum dilikuidasi Jiwasraya ini, Pak, pastikan permasalahan kita dengan karyawan Jiwasraya, permasalahan kita dengan nasabah, sudah pasti tadi *kan*, terus juga dengan pensiunannya itu, Pak, selesai, Pak, ya. Karena yang pensiunan ini kemarin ketika RDPU dengan kami, itu mereka sudah kerjanya 30 tahun ke atas, Pak. Berarti *kan* mereka *tuh* sudah istilahnya sudah membayar kepada Jiwasraya dan mereka tidak mendapatkan ini, apa, di akhir dengan baik ya. Dan tentu kita harapkan ke depan, yang pensiunan Jiwasraya ini mendapatkan bagian ya, RPK yang, yang sudah disepakati ya oleh kita semua.

Terima kasih, Pimpinan, itu saja.

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Bu Nevi.

Pak Jon belum ada, Pak Harris Turino.



**F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):**

Sesuai petunjuk Bapak Presiden.

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VI,  
Yang terhormat Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, Pak Wamen, dan  
Pak Wamen III yang, yang hari ini kakinya sakit,  
beserta seluruh jajarannya,**

Pertama-tama saya memberikan apresiasi bahwa capaiannya selalu bagus, Pak ya, tetapi tentu saja ada beberapa hal yang perlu disorot, Pak, ya. Yang pertama mengenai tambahan anggaran sebesar 66 miliar sehingga menjadi 343 miliar, menurut saya ini bukan isu besar. Dan kami dari Komisi VI mendukung apalagi dengan satu komitmen yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Erick bahwa dividen 2025 ditargetkan mencapai 90 triliun, ini angka terbesar yang pernah dicapai, semoga dividen 2025 juga nanti kontribusi dari menteri yang sama, ya.

Yang kedua adalah mengenai *dividen* itu sendiri, Pak, tahun ini ditargetkan 85,6 triliun, tetapi juga harus disadari, Pak, bahwa sumber *dividennya* ini masih dari 5 perusahaan, Pak, ya. Ini 85% kontribusi berasal dari 5 perusahaan, sehingga ini harus menjadi perhatian, supaya lebih menyebar, distribusinya lebih merata.

Kemudian mengenai kenaikan aset, tadi Pak Erik mengatakan, kenaikan aset salah satunya adalah karena dibawa ke publik. Mungkin lebih baik juga dilakukan evaluasi, Pak, dari perusahaan-perusahaan BUMN yang *go public* selama Pak Erick menjabat sebagai Menteri BUMN itu, berapa yang sukses, berapa yang gagal, berapa yang harga sahamnya mentok di bawah dan tidak bergerak atau tidak *liquid*, Pak, karena ini nanti dari masing-masing BUMN ini bisa dipelajari *case-nya*, sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk ke depannya ketika BUMN akan *go public*.

Kemudian mengenai kenaikan aset juga, apakah memang punya *balance sheet* yang konsolidasi semua BUMN, Pak? Nah kalau ada, mungkin di secara tertulis bisa disampaikan, Pak, karena kita belum pernah melihat *balance sheet* untuk seluruh BUMN *consolidated*.

Mengenai ROA dan ROE, ini 2022 ke 2023 mengalami stagnasi, Pak, memang naik ya dari 0,2 menjadi sekitar 3 untuk ROA dan ROE-nya dari eh 0,5 di tahun 2020 naik menjadi sekitar 10, tapi *kan* 2 tahun terakhir ini stagnasi ada apa kira-kira, Pak, ya.

Dan berikutnya mengenai laba bersih yang naik 11,2% menjadi 327 triliun, mungkin secara tertulis tulis juga bisa dipaparkan, Pak, berapa BUMN yang rugi, berapa BUMN yang menghasilkan keuntungan, sehingga dari situ kembali lagi bisa dievaluasi, tadi Bu Nevi sudah mengatakan bahwa kasus

yang terjadi pada Indofarma juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita ke depannya sehingga mana yang akan diselamatkan, mana yang memang sudah tidak layak untuk diselamatkan, harus dilakukan likuidasi. *Makasih.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Waalaikumsalam,*

Ke sebelah kiri, Ibu Melani.

**F-P.DEMOKRAT (Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI):**

Ya, udah.

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,  
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Arya Sinulingga,  
beserta seluruh jajaran di BUMN**

Pertama-tama saya memberikan apresiasi tentunya atas kinerja BUMN yang selama ini di bawah pimpinan Pak Erick Thohir, semoga makin Pak Erick Thohir makin sukses ke depannya.

Kemudian seperti yang tadi dikatakan juga oleh rekan saya tentang rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga tahun anggaran 2025 yang kita ketahui bahwa selama ini terus diadakan untuk BUMN penyertaan modal negara yang tentunya untuk penugasan Pemerintah sebesar 69% atau 30,4 triliun dan untuk pengembangan usaha 27% atau 11,8 triliun dan restrukturisasi 4% atau 2 triliun. Nah, tentunya kita berharap harapkan BUMN-BUMN ini bisa menambah setoran dividen tidak hanya dari BUMN yang itu-itu saja dan semoga BUMN-BUMN yang lain juga bisa didorong untuk memberikan dividen atau kontribusi untuk menyetorkan dividen kepada negara, itu harapan kami.

Dan juga saya juga ingin mengetahui juga karena banyak yang menanyakan, BUMN itu sebenarnya sekarang ada berapa dan berapa yang mempunyai keuntungan dan berapa yang rugi karena mereka pada tahu bahwa banyak BUMN yang sekarang sudah di ada penggabungan-penggabungan, jadi BUMN mana yang, yang tidak ada lagi karena sudah ada penggabungan.

Kemudian saya juga menanyakan dengan kaitannya transformasi digital, yang saya ketahui bulan Mei 2024 yang lalu telah diluncurkan *Government Technology (GovTech) INA Digital* di mana *GovTech* bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai *platform* atau aplikasi. Sejak diluncurkan pada Mei 2024



yang lalu sejauh mana progres konsolidasi yang telah dilakukan dan bagaimana juga Kementerian BUMN menyinergikan langkah ini dengan kementerian lembaga, lainnya sebab aspek keterpaduan layanan digital tentunya melibatkan banyak Kementerian atau Lembaga sehingga diperlukan kolaborasi yang efektif. Juga mengingat terjadinya banyak peretasan di dunia *cyber* yang berdampak langsung pada terganggunya layanan publik di beberapa waktu belakangan ini, bagaimana pula Kementerian BUMN yang ditunjuk sebagai pengelola, untuk dapat memitigasi risiko terjadinya peretasan di masa mendatang. Dan bagaimana juga penguatan strategi transformasi digital adanya INA Digital atau *GovTech* yang dapat terlihat pada rencana kerja anggaran pada tahun 2025 yang mendatang, yang akan nantinya diisi oleh pemerintah baru, dan bagaimana mempersiapkan strategi tersebut untuk dipergunakan pada tentunya pemerintahan yang berikutnya, dan kalau enggak salah yang ditunjuk itu adalah Peruri, ya, kenapa ditunjuknya Peruri mungkin ada bahan pertimbangan-pertimbangan yang lain.

Kemudian saya juga ingin menyoroti berkaitan dengan target dari prioritas dari Kementerian BUMN untuk terus meningkatkan peran perempuan di kalangan BUMN. Kita ketahui porsi perempuan dalam direksi BUMN ini terus meningkat, terima kasih Pak Menteri, tahun 2023 lalu itu telah mencapai direksinya dari perempuan itu mencapai 20,88% yang ingin ditargetkan mencapai 25% dan di periode 2019-2024, bagaimana Pak Menteri untuk terus meningkatkan porsi perempuan dalam meningkatkan dalam di tingkatan direksi BUMN? Sekarang ini, peran komposisi direksi perempuannya berapa yang telah tercapai? Terima kasih atas peran, peran perempuan yang diberikan oleh Pak Menteri untuk supaya peran perempuan menjadi lebih banyak lagi yang mengisi direksi-direksi BUMN.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Selanjutnya ke sebelah kiri, Pak Sonny, sebelah kanan.

**F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA, S.H.):**

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan beserta segenap Anggota,  
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wakil Menteri,  
beserta seluruh jajaran,**

Pertama, karena *enggak* tahu ini sepertinya, tapi mungkin rapat kita yang terakhir dalam periode ini, mungkin ya, kalau di jadwalnya begitu ya Pimpinan, ya? Masih ada? Karena sangat *mepet banget*, tapi walaupun tidak ada jadi sekali lagi saya minta maaf, kalau dalam selama ini mungkin ada kesalahan kekurangan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, saya kira BUMN telah bersama-sama memberikan karya terbaiknya, oleh karena itu dalam rapat yang, yang mungkin terakhir ini saya memberikan catatan besar saja. Tentu saja saya berharap dan berdoa, Pak Menteri tetap jadi menteri.

Pertama mungkin catatannya, catatan besarnya adalah tadi disinggung soal proporsi PMN versus *deviden* 2020-2024 yang saya melihat ini *problem*-nya di Indonesia, saya *enggak* tahu nanti datanya yang benar yang mana. Tapi dalam media, salah satu media itu ada perbedaan yang cukup signifikan, jadi kalau dalam satu media kalau saya sebut saja *Infobank*, jadi itu nanti perlu diluruskan, boleh menggunakan hak jawab dan sebagainya, karena kalau melihat di majalah itu ini sangat-sangat tidak bagus, karena kalau dalam di media tersebut PMN-nya hanya ada 263,79, kemudian *devidennya* 279, sehingga hanya dapat 15 sekian triliun saja. Nah, saya kira ini, ini, ini agak cukup, cukup timpang, bahkan dalam, dalam media tersebut, dalam majalah tersebut dibandingkan dengan salah satu bank swasta yang satu saja, *dividennya* memberikan luar biasa, termasuk mengulas soal hanya beberapa BUMN yang jumbo saja sebetulnya, tapi yang lain itu bikin capek. Nah, ini saya kira catatan ke depan yang mungkin perlu disampaikan kepada, kalau syukur-syukur Pak Erick tetap jadi menteri BUMN, tapi kalau tidak, saya kira nanti ada catatan besarnya di situ.

Kalau hampir 5 tahun yang lalu saya juga pernah meminta soal *roadmap* dan sekarang saya juga sepertinya belum pernah punya, seingat saya saya, saya waktu itu saya, saya singgung secara, secara utuh *gitu* ya. Soal *holdingisasi* dan sebagainya, di sini *enggak*, *enggak* pernah, Pak, setahu saya saya, saya pernah minta *gitu*, gambaran umum soal *holdingisasi* misalkan, ada orang menyatakan itu berhasil, ada orang yang mengatakan itu, itu gagal. Termasuk yang menyebutkan bahwa soal *key perform* indikator selama ini bukan hanya soal laporan keuangan semata, tapi juga bagaimana relas politik, bagaimana mengakomodir kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, bagi saya seperti kita yang hidup di Indonesia itu, itu sesuatu hal yang wajar, tapi ketika hanya menerima "tekanan politik" sementara orang yang diberikan tidak tepat, ya saya kira itu yang *bikin* hancurnya BUMN kita.

Sama dengan soal misalkan Indofarma, kalau dalam agenda salah satunya adalah Indofarma misalkan proses *holdingisasi* itu apakah semata-mata yang awalnya lebih pada farma, kemudian pada berubah menjadi alkes dan herbal, ataukah hal-hal yang lain? Misalkan saja, kalau dalam satu pemberitaan disebutkan, ada *double* jabatan di manajer keuangannya, sehingga salah satu yang bikin *fraud* di situ adalah antara *holding* dengan anak perusahaan, karena ada sekian miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang akibatnya adalah kemudian hak-hak karyawan yang tidak terpenuhi.



Saya rasa sekali lagi itu, yang lain-lain kemungkinan soal karena juga waktunya *mepet*, Pak, saya berharap Kementerian BUMN juga bisa menyusun regulasi bagaimana kultur dan natur yang akan dibangun oleh Pak Erick yang mungkin belum selesai, itu ada aturan main yang jelas. Misalkan saja soal PMN di PLN, misalkan, program listrik desa yang *gede* itu, nah setahu saya cukup dengan peraturan atau keputusan Menteri BUMN, pengalokasiannya bisa diubah. Jangan sampai itu menurut saya bisa terjadi, kita menyetujui PMN-PMN itu karena alokasinya sebagaimana yang diusulkan sebelumnya. Tapi kalau tiba-tiba nanti karena dinamika politik, karena kebutuhan yang sebetulnya tidak urgen, misalkan karena desakan IKN dan sebagainya mohon maaf, kemudian dialihkan ke sana, ya saya kira ratusan desa mesti akan tidak akan pernah teraliri listrik oleh PLN. Jadi, saya berharap, penguatan di sisi regulasi yang dibuat oleh BUMN ke depan, bisa, bisa, bisa apa, disusun, bisa dibuat, sehingga misalkan akhlak yang ini sudah mulai menjadi semangat di Kementerian BUMN itu juga tidak hilang.

Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, terakhir saya tutup dengan pantun.

*Menjemput kekasih dari Vatikan  
naik Mercy agar lebih aman dan nyaman  
terima kasih kami ucapkan  
atas dedikasi dalam menjalankan pengabdian*

Sekian.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Kita nikmati pantunnya dulu.

Selanjutnya, kami persilakan, Pak Abdul Hakim.

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Ini mestinya kalau sudah pantun, sudah selesai rapatnya.

*Matur suwun, Pakde Bimo.*

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI,  
Yang saya hormati Pak Menteri Erick Thohir, Pak Wamen, Pak Tiko,  
beserta seluruh jajaran,  
Pak Robin, Pak Robbert, Bapak Arya, makin *brewok*.**

Saya tadi menyambung sedikit dari Mas Sonny, Pak Menteri, karena berbicara dengan kultur, ini mungkin kejadiannya 2 tahun lalu di PTPN X, Pak Menteri, *oke*, nah itu mungkin nanti bisa di *cross check* ke Pak Ghani. Jadi,

pada waktu itu memang ada kejadian yang terindikasi kultur-kultur feodalnya PTPN masih muncul, Pak Menteri. Jadi, nanti mungkin bisa di *cross check* Pak Ghani, kejadian tersebut supaya bisa dievaluasi ke depannya.

Kemudian berbicara soal anggaran, prinsipnya anggaran ini ya memang perlu didorong, tentu dengan kenaikan target 5 triliun, kalau *cuman* penambahan 66 miliar, itu sambil *merem*, disetujui *aja*, harusnya, Pak Menteri. Jadi mungkin di Komisi VI juga sambil *merem* pasti menyetujui karena *kan enggak* terlalu signifikan. Akan tetapi, kami nanti mungkin *nitip*, Pak Menteri, berkaitan dengan penambahan anggaran ini juga selain menggenjot daripada dividen, pengawasan-pengawasan terhadap BUMN. Jadi, sering kali kalau saya lagi nongkrong, Pak Menteri, dengan anak-anak muda, juga berbicara soal BUMN, "Kenapa BUMN sering terjadi *fraud* dan lain sebagainya". Dengan tegas, saya sampaikan di forum itu bahwa "Bagus, menterinya sekarang berani buka boroknya di dalam kementerian ini". Karena jangan sampai ini menjadi bom waktu. Istilahnya orang Jawa, *mblangkon*, *mbendol mburi*, apa, terjadi di belakang, lebih baik dibuka sekarang, diurai, dan saya benar-benar mengapresiasi keberanian Pak Erick mengambil langkah yang mungkin *enggak* semua Menteri BUMN berani mengambil langkah itu, Pak Menteri. Jadi, berkaitan dengan anggaran, seperti itu.

Kemudian, berkaitan dengan kinerja, juga sering dibahas ataupun mungkin muncul di media sosial itu, "Ini BUMN kok minta PMN-PMN *mulu*". Akan tetapi, dari paparan yang disampaikan Pak Menteri ini gamblang dan jelas bahwasanya jumlah PMN yang diminta dan dividen yang diberikan, lebih besar dividen yang diberikan oleh BUMN kepada negara. Walaupun memang teman-teman juga ada *concern* itu di beberapa BUMN saja, tapi harapan kami, dengan perbaikan total yang dilakukan oleh Pak Menteri ini ke depannya itu bukan cuma 5 atau 10 BUMN saja, tapi kalau bisa seluruh *holding* bisa memberikan sumbangsih dividen yang sangat luar biasa.

Kemudian, berkaitan juga dengan kontribusi terhadap negara, saya ketika melihat nilainya ini sangat kaget, Pak. Awal *njenengan* menjabat, sumbangsih dividen 40 triliun, ternyata di ujung bisa dua kali lipatnya. Jadi, saya rasa di 2025, 90 triliun itu angka yang kecil, ya, harus optimis dulu, Pak Menteri, ya kan, walaupun tertawanya renyah semua, tapi saya meyakini itu *Insyallah* bisa. *Njenengan* megang sepak bola yang *kecenderungannya aja ruwet* saja bisa, apalagi target 90T, Pak. Kalau 66 miliar, Komisi VI *Insyallah* menyetujui usulan tambahan tersebut, Pak.

Dan juga ketika melihat rasio keuangannya, ROA dan ROE tadi, kenaikannya bahkan dua kali lipat, ini menunjukkan performa BUMN dan BUMN kita bertumbuh dan berkembang. Tentu di tengah kondisi yang beberapa kali banyak ketidakpastian, mulai dari COVID kemudian sentimen perang, dan lain sebagainya. Tapi BUMN kita bisa bertumbuh. Jadi, saya mengapresiasi yang sangat mendalam, Pak Menteri.

Kalau tadi teman-teman menyampaikan ini rapat terakhir, sepertinya Mas Sonny masih ada satu kali rapat lagi, Mas. Masih ada. Jadi tolong disiapkan pantunnya lagi nanti ini, Mas, pantun yang lain, ya *kan*. Jadi,

menutup apa yang saya sampaikan, ya, *panjenengan* luar biasa dalam memimpin kementerian ini, Pak Menteri. Jadi, walaupun besok akan ada kabinet baru, saya rasa jabatan yang pantas untuk Pak Menteri ini minimal Menteri BUMN kembali. Minimal, Pak Menteri begitu. Ya *kan?* Maksimalnya, mudah-mudahan yang terbaik untuk Pak Menteri. *Matur nuwun sanget.*

*Ihdinaş shiraṭal mustaqim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Walaikumsalam,*

Pak Jon Erizal, *enggak* ada, Pak Muslim, Oh Pak Jon Erizal, silakan.

**F-PAN (Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):**

Baik, terima kasih, tadi izin sebentar, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,*

**Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,  
Pak Menteri yang saya hormati dan kita banggakan, Pak Wamen, Pak  
Sesmen, Pak Asisten 3 yang juga merangkap segala penjurur,  
teman-teman dari BUMN yang hadir serta yang mendampingi,**

Menarik, Pak Menteri. Ini apa yang disampaikan tadi, saya lihat semuanya membuat kita optimis ke depan. Kekurangan 66 triliun itu hal yang sangat tidak saya duga, ya. *Kok* bisa-bisanya Menteri Keuangan masih mengurangi begitu, dengan prestasi yang luar biasa. Nah, makanya Pimpinan, waktu itu saya mengusulkan untuk *join session* kita sama Komisi XI untuk mengundang Ibu Sri Mulyani dan Kementerian BUMN untuk duduk bersama. Karena peran serta ini luar biasa, dan ini adalah bagaimana pemerintah secara keseluruhan ini mengoptimalkan sumber daya-sumber daya yang memang produktif. Jadi sangat disayangkan kalau ini masih juga *dibikin bargaining.*

Hasil yang dicapai luar biasa, tapi ada pertanyaan atau pemikiran menggelitik *nih*, Pimpinan, sama Pak Menteri juga. Usulan anggaran 2025 yang disampaikan itu, kalau kita lihat, artinya komposisi Kementerian BUMN ini tetap, *gitu loh.* Apakah ini tidak ada wacana perubahan? Nah, kalau ini berubah, seperti apa nanti penyesuaiannya ini, *kan* sementara kita sudah kurang mengenal soal penyesuaian anggaran. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menurut saya sangat krusial, begitu *loh*, tapi mudah-mudahan harapan saya di tahun pertama ini sesuai dengan usulan yang dibuat pada sekarang ini. Karena kalau itu berubah, sangat sulit menyesuaikan, *gitu*, baik di teman-teman di BUMN sendiri, dan apalagi nanti perubahan itu juga orangnya juga berubah, yang *mimpin* di lembaga itu juga berubah. Nah, ini seperti apa nanti? Nah, ini perlu diantisipasi oleh kita di Komisi VI ini, Pimpinan.

Nah, kemudian, data ini sangat luar biasa menurut saya, dalam kondisi Covid pun, BUMN kita ini bisa *survive*, bisa eksis, dan bisa tumbuh. Ini *enggak* gampang, *enggak* banyak BUMN yang bisa bertahan seperti itu. Cuma saya ingin sedikit kalau bisa di *split*, Pak Menteri, dipisahkan, mana saja BUMN yang menguntungkan sekali, ini *kan average, nih*, konsolidasi, mana yang masih belum. Kita harus *clear*, melihat transparan, oh ada memang BUMN yang belum teratasi, oh ada yang sudah teratasi, ada yang terus kita dorong peningkatannya. Ini perlu disampaikan juga ke kita dan ke publik. Jadi kita lihat bahwa, nah kemudian juga kalau bisa, mungkin melalui Pak Tiko, kalau bisa juga, 5 tahun ke belakang atau bila perlu 10 tahun ke belakang, jadi kelihatan *growth*-nya begitu *lho*. Walaupun masih rugi, tapi tumbuhnya masih kelihatan, jadi publik melihat, "Oh, ini betul-betul", apa namanya. Karena, *gini*, kalau konsolidasi begini, publik masih melihat, "Ya, yang itu *kan* rugi, yang ini *kan*", yang selalu dilihat negatif. Kalau kita lihat angka 1 sampai 100, 1, 2, 3, 4, 9, dan seterusnya, nanti ada angka 98 tertulis dua kali. Yang dilihat orang, ya, yang dua kali itu yang salah, yang 99,99% itu betul *gitu*, jadi, publik akan melihat yang kurangnya itu. Jadi oleh karena itu, kalau kita ekspos itu semua, saya yakin ini juga akan menambah pemahaman publik.

Jadi, Pimpinan, ini perlu juga kita mendapat informasi atau ketegasan bahwa ke depan ini seperti apa BUMN ini, *gitu*. Karena anggaran yang kita setuju sekarang itu dengan konsep pemikiran ke depan ini, struktur organisasinya sama seperti yang sekarang.

Demikian, Pimpinan.

*Billah taufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Kami persilakan, Pak Muslim.

**F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,  
Pak Menteri, Pak Erick,**

Cerah sekali hari ini kelihatan *kan*, mudah-mudahan dapat posisi yang bagus ini,

**Pak Wamen beserta jajarannya, serta juga Bung Arya yang setia selalu bersama kita semua,**

Pertama, tentu Pak Menteri, saya mengapresiasi luar biasa berkaitan dengan, berkaitan BUMN, tentu yang berhasil, saya melihat mencatat di tempat saya ini, Pak Menteri ini, kinerja baik ya dalam beberapa waktu terakhir. Tentu hal ini juga dipicu oleh keberhasilan sejumlah BUMN dalam merampung sekitar 92% ya, proyek strategis nasional. Sehingga, data di kami, Pak Menteri ini bahwa penerimaan yang diperoleh Kementerian BUMN yaitu melejit dari 1.930 triliun pada 2020 menjadi 2.933 triliun pada tahun 2023.

Tentu hal ini kita juga melihat laba ya bersih ya, yang diperoleh BUMN juga melonjak dari 100, dari 13 triliun, ya, pada 2020 menjadi 327 triliun di 2023, atau naik sekitar 2.415, ya. Tentu yang menjadi catatan, Pak Menteri, bahwa kalau kita lihat juga kontribusi BUMN, kita lihat baik PNBPN, dividen, dan pajak, ya, ini totalnya 1.940 triliun, kalau kita lihat.

Yang kedua, berkaitan dengan PMN, sebelum masuk ke PMN, Pak Menteri, khusus saya melihat di 2024, belum ada gambaran. Termasuk apakah karena tinggal satu bulan lagi, ya *kan*, tentu kita berharap bahwa kontribusi di 2024 mudah-mudahan masih bisa disampaikan, mudah-mudahan kita masih ada satu pertemuan lagi, Pak Menteri.

Yang kedua, tentu berkaitan dengan beberapa BUMN yang menjadi *concern* kita, Pak Menteri, termasuk juga terakhir dengan Indofarma. Tentu Indofarma ini kita lihat di sini masih Indofarma Grup, masih diusulkan diselamatkan dengan memberikan dana talangan sebesar 95 miliar. Tentu dalam hal ini, tentu kita akan dukung sepenuhnya, Pak Menteri. Yang menjadi catatan yang kedua, ini menjadi *warning*, khususnya di dunia farmasi. Kita lihat hampir di sebagian besar, saya tidak tahu problem di mana ini, apakah Kimia Farma dan lain-lain. Saya *enggak* tahu, apakah sudah terlalu lama seperti ini, memang harus ada reformasi total, khususnya di dunia farmasi. Jadi, kita kalah terus dengan swasta, padahal kita punya kewenangan lebih, biarpun Pak Menteri telah banyak melakukan, termasuk mengampulasi beberapa BUMN-BUMN yang kita anggap tidak produktif. Saya sepakat, Pak Menteri, ini mungkin dalam sejarah, di era Pak Erick berani mengambil langkah-langkah konkret. Makanya kita berharap, harus diberi lima tahun lagi waktunya, Pak Menteri, ini, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan, jadi tidak terputus, ya Pak Arya, ya? Pak Arya juga lebih semangat lagi. Artinya bahwa masih banyak tugas-tugas yang harus dilakukan.

Terakhir, Pak Menteri, ada tugas saya ke Dapil Aceh, memang belum terselesaikan, yaitu penyerahan modal khususnya BUMN di kawasan KEK Arun, Pak Menteri. Itu boleh dicek kembali, ada beberapa BUMN, termasuk Pertamina, Pelindo, dan beberapa. Kita harapkan. Saya waktu itu ikut dampingi Pak Erick waktu itu, kita resmikan pabrik pupuk di Lhokseumawe bersama Pak Jokowi, ini masyarakat mempertanyakan, khususnya pemerintahan Aceh, mungkin bisa di *review* kembali, sejauh mana Penyerahan Modal Negara di kawasan KEK Arun.

Mungkin itu beberapa hal, Pimpinan. Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Walaikumsalam,*

Demikian pendalaman dari kawan-kawan Anggota Komisi VI. Selanjutnya, dari meja Pimpinan, terkait dengan RDPU dengan Serikat Pekerja dari Indofarma, kita sampaikan secara formal tentang kesimpulan yang ada terkait dengan RDPU Audiensi dengan karyawan yang PT Indofarma,

- yang pertama, perlu kami sampaikan, mengusulkan skema pemberian dana talangan untuk penyelamatan Indofarma,
- kemudian kesimpulan kedua, hak-hak karyawan Indofarma seperti upah, tunjangan, iuran BPJS, dan DPLK serta pesangon para pensiun dengan nilai 95 miliar agar bisa segera dibayarkan. Tapi nanti, *monggo* Pak Menteri, ditindaklanjuti sejauh mana secara lebih realistis,
- kemudian, jika diperlukan penyelamatan terhadap Indofarma Group, maka dapat dilakukan dengan pendekatan karyawan untuk pensiun dini,
- kemudian terhadap oknum pejabat dan mantan pejabat PT Indofarma dan PT Indofarma Global Medika yang diduga melakukan *fraud*, agar segera dilakukan penindakan hukum,
- yang kelima, evaluasi terhadap kinerja *holding* BUMN Farmasi terkait dengan kinerja anak perusahaannya. Ini beberapa yang hasil RDPU.

Kemudian, dari Jiwasraya yang terpenting, mungkin perlu diperhatikan terkait dengan janji atau kesepakatan, memperhatikan kondisi *cash flow* PT Asuransi Jiwasraya sangat berat, maka kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pendiri DPPK Jiwasraya untuk memenuhi kewajiban kekurangan DPPK Jiwasraya sampai akhir 2022, yang pasti 95% adalah sebesar 132 miliar yang pernah dijanjikan dan sampai hari ini belum terealisasi.

Demikian yang dari kami, meja Pimpinan. Apakah masih ada? Silakan, Pak Martin.

**WAKIL KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Baik, *makasih*, Pak Bimo.

**Yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran,**

Saya menindaklanjuti, tadi sudah dibaca oleh Pak Arya Bima, karena kebetulan pada waktu menerima RDPU Serikat Pekerja Indofarma itu saya pimpin. Saya mengapresiasi, tadi Pak Wamen mengatakan bahwa ada sebagian produk kali, Pak, ya, yang bisa dijual. Nah, cuma mengingatkan bahwa *concern* dari para pekerja mengingatkan dulu pernah katanya di





Merpati. Ketika itu dilakukan kewajiban kepada kreditor didulukan, sehingga hak-hak karyawannya juga tidak bisa dipenuhi secara maksimal. Nah, jadi ini saya ingin menyampaikan aspirasi bahwa kalau memang masih ada produk atau aset yang bisa dijual, agar bisa dimaksimalkan untuk pemenuhan hak-hak karyawan yang menurut perhitungan Serikat Pekerja itu mencapai 95 M, jadi *concern* itu saja yang saya tambahkan, Pak Menteri dan Pak Wamen.

*Makasih*, Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Demikian pendalaman dari kawan-kawan Anggota Komisi VI. Tapi sebelum ke Pak Menteri, ada tambahan dari seorang profesor. Silakan, Prof.

#### **F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A):**

Terima kasih, Pimpinan yang baik hati. Ini ganteng sekali, juga Pak Menteri tambah awet muda ya, kelihatannya *happy nih* wajahnya, menjelang pengumuman kabinet.

Ada beberapa poin aspirasi, Pak Menteri, mohon dicatat, Pak Menteri. Seminggu yang lalu, Asosiasi Keramik datang ke sini, ASAKI. Beliau menyampaikan bahwa industri ini *enggak* baik-baik saja, artinya sedang masalah. Masalah, ada masalah di Perdagangan, ada di masalah BUMN juga, ini soal suplai gas, pemanfaatan HGBT, Pak Menteri *kan tahu kan?* Ini mulai Agustus 2024, itu dibatasi hanya turun lagi, Pak Menteri, tadinya 60-70%, sekarang tinggal 50, yang bisa disuplai dari alokasi, berarti *kan* turun terus. Sudah masalah industrinya berat, ditambah lagi, kalau mau pakai lebih, boleh, berarti *kan* ada barangnya ini, Pak Menteri. Kalau mau pakai lebih boleh, tapi harganya *enggak* 6 lagi, tapi menjadi 13,85 US Dollar per MMBTU. Pak Arya, mohon diingatkan Pak Menteri, juga *nih* suka lupa *nih*, *kan* banyak tugas sekarang *kan*. Urusannya banyak, Pak Menteri Erick, ini. Jadi Beliau, mereka mengatakan sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Sudah 70% turun, 60 sekarang jadi 50. Barangnya *enggak* ada, alasan. Tapi, kalau mau pakai lebih, bisa, bayarnya lebih. Nah, ini mohon jalan keluar dari asosiasi yang datang mengeluh ke Komisi VI. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah pengelolaan kawasan Grand Boutique Center di Mangga Dua, Pak, dari kereta api, ya, ini *kan* ada lahan di situ, sudah ada persetujuan penugasan supaya pengelolaannya diserahkan kepada koperasi di sana. Nah, ini kita butuh, mereka butuh penugasan dari Dirut KAI ke Dirut KAPM. KAPM *kan* anak usaha, anak usaha Kereta Api Indonesia. Ini ada dua direksi sudah tanda tangan, Pak. Tapi, yang sisa lainnya belum berani, karena *nunggu* Dirut, nah, ini sudah setahun, Pak Erick. Yang *kaya-kaya gini lah* Birokrasi panjang sekali, Pak. Nah, ini mohon Pak Erick bisa catat, karena mereka *tuh* di dapil saya, aspirasi ini, Pak, banyak yang menyumbang suara ke saya sehingga bisa masuk lagi ke Komisi VI, ya, betul *kan*, Pak, *kan* biar ketemu lagi kita. Nah, ini cukup lama sudah berlarut-larut, *nih*, mereka sudah demo dulu. Nah, ini mohon Pak Menteri bisa mencatat dua poin penting ini.



Kalau yang lain *sih* saya setuju, Bapak Ini baguslah, cemerlang. Memimpin perusahaan seperti BUMN ini berhasil, *gitu*. Ini dari lubuk hati yang terdalam saya apresiasi sama Bapak, begitu, kalau saya bilang *enggak* bagus, saya bilang *enggak* bagus, saya kritik, tapi ini bagus, Pak Menteri ini, 90 triliun itu saya pikir memang kurang, Pak, *bulatin aja* 100, Pak, itu. Seratus *kan* angka bagus. jadi itu, dan saya yakin bisa itu berhasil, 100 triliun itu bagus angkatnya, ya, 100 itu *kan* angka bagus, *gitu*. Nah, tolong nanti mungkin bisa ditambah, itu.

Catatan saya soal BUMN ini memang ada beberapa, ini keberhasilannya banyak. PMN, apa, *sorry*, dividen, pajak besar, sumbang ke negara. Tapi selalu di luar itu, selalu *ngaitkan* dengan hal yang negatif. Nah, ini tolong diselesaikan, ya, Pak Arya *kan*, selalu kritik-kritik di grup itu. Saya baca terus itu, Pak Arya menjawab terus. Ini dijawab terus, Pak. Bagus, Pak anak buah Bapak ini, Pak. Dia *counter* terus semuanya yang di grup, apa itu, grup Sinergi BUMN, apa itu, ya, jadi itu. Nah, itu soal, selalu yang disorot, pertama, soal PMN, ini *gede banget* PMN setiap tahun. Padahal kita tahu, ini masalahnya banyak *kan*. PMN karena PSO dan sebagainya. Jadi itu, orang luar ya biasa, cari-cari kelemahan.

Yang kedua adalah soal BUMN yang bangkrut. Sorotan. Nah, jangan, nanti untuk ke depan, jangan lagi ada yang bangkrut, ya. Jadi semuanya mestinya sudah baik.

Yang ketiga soal BUMN yang krisis kena kasus hukum, ya. Nah, ini ke depan harus dicegah, Pak, Pak Menteri, kasus hukum ini, dari mana? Dari pemilihan direksi sama komisaris, Pak. Kalau Pak Menteri ini *milihnya* direksi sama komisaris banyak yang *enggak* benar dan *enggak* kerja, nanti kena juga. Saya tahu ini berat, Pak. Bapak ke depan ini *milih* direksi dan komisaris. Terus-terang, lebih berat dari periode-periode sebelumnya, ini, periode ke depan akan lebih berat. Bapak *milihnya* itu banyak tekanan nanti. Tapi itu penting, Pak, kalau *enggak*, krisis hukum jalan terus, nanti, kasus hukum.

Yang keempat soal GCG, Pak, nah ini banyak juga di BUMN. Nah, empat hal ini yang selalu disorot oleh orang luar. Dia *enggak* mau tahu soal dividen Bapak yang begitu besar dan sebagainya yang diberikan oleh BUMN, ya, mereka *enggak* mau tahu, ini *aja* dikaitkan, *nih*, ini terus. *Nah*, ini yang harus Bapak antisipasi, menurut saya. Jadi dari berbagai grup WA, itu saya baca terus, itu aja yang diserang, Pak Erick. Selalu ada lubang, dia serang terus dan serang terus.

Nah, itu jadi dua catatan penting tadi dari aspirasi dapil, Pak, soal pengelolaan kawasan Grand Boutique Center, Bapak tolong *contact* Dirut KAI-nya ini biar lebih cepat. Dan yang kedua, soal suplai gas, suplai gas, Pak Tiko, tinggal 50% sekarang, Pak, ya, jadi mohon diperhatikan, Pak.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**



Baik terima kasih, Prof. Pak Sarmuji? Cukup?

Baik, saya serahkan kembali ke Pak Menteri untuk dijawab.

**MENTERI BUMN RI (ERICK THOHIR):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Pimpinan.

Mungkin ada beberapa yang saya coba bisa jawab, misalnya tadi mengenai target 90 triliun, yang sebenarnya kalau kita awali itu dimulai dari dividen 30 triliun, jadi kenaikannya ini hampir 160% lebih. Saya tidak berani bicara bisa atau tidak, tapi tentu kita akan upayakan, karena ini nanti selesai di bulan Oktober, ya tentu deteksi dini yang kita bisa lihat, angka ini angka yang tidak mudah, karena kondisi daripada hari ini *cost of logistic* naik, lalu juga penurunan daripada sumber daya alam juga masih turun. Ya memang satu-satunya yang bisa kita pastikan, ya tadi seperti yang tadi disampaikan, efisiensi berkelanjutan, di mana memang perusahaan-perusahaan yang tidak dalam kondisi siap berkompetisi secara terbuka, karena Indonesia *kan market*-nya terbuka, bukan tertutup, ya mau tidak mau ya memang harus berani seperti sebelum-sebelumnya ditutup, *gitu*.

Dan kalau kita lihat dari 47 BUMN ini *kan*, ada 7 yang masih kurang sehat. Tapi dibandingkan sebelumnya yang jumlahnya mungkin hanya 15 sampai 20 yang sehat, jadi penurunannya sudah sangat signifikan, *gitu*. Jadi izin, untuk yang 90, karena sudah diketok Banggar, kita akan usahakan. Tetapi saya melihat kuncinya di efisiensi.

Lalu mengenai isu-isu hukum, saya sangat setuju, sejak awal mendorong keterbukaan. Jadi, kalau memang ada pembicaraan di publik mengenai BUMN A korupsi, BUMN ini, ya, buat kami sebagai bagian pengelola, sangat senang, karena tidak mungkin pengawasan itu dilakukan secara menyeluruh dan detail. Kita melakukan pengawasan secara menyeluruh dan detail, tapi tidak mungkin, tidak ada yang sempurna, lah. Jadi memang sejak awal keterbukaan informasi, keterbukaan kepada kasus-kasus ini, kita sangat proaktif, baik sama KPK, Kejaksaan, pihak Kepolisian, BPK, BPKP, kita sangat proaktif, karena memang tadi kembali, untuk mengejar target, mau tidak mau harus ada efisiensi dan *good corporate governance*.

Untuk terobosan-terobosan, ya kembali kami melihat, salah satu membawa perusahaan ini menjadi *public company*, itulah pengawasan yang baik, karena semua pihak bisa melihat angkanya secara transparan. Apalagi ketika ke publik sendiri, itu *kan* ada aturan *good corporate governance* yang mengikat juga ketika menjadi perusahaan publik. Dan di situ juga kita bisa lihat tentu dengan data-data yang terbuka dan kita bisa lihat *track*-nya, apakah ada penurunan dan kenaikan, dan bahkan kita bisa *benchmarking* secara terbuka, kenapa? Ketika menjadi *public company kan* banyak usaha sejenis lain yang saya rasa bisa menjadi bagian komparasi.

Nah, jadi, tentu saya, tentu sama, kalau ini pun rapat terakhir, saya mengucapkan terima kasih, kalau masih ada, kita sangat senang diundang, ya. Karena tanpa dukungan dari teman-teman Komisi VI, saya rasa tidak mungkin kita sampai di sini. Kalau pun ada rapat sekali lagi, nanti pantunnya belakangan, jadi.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Baik, terima kasih, Pak Menteri. Selebihnya mungkin bisa jawaban secara tertulis, nanti kami tunggu jawaban tertulisnya sebagaimana biasa.

Sekarang kita masuk ke *draft* kesimpulan. Banyak amat kesimpulannya.

**WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Lebih banyak dari pembahasannya.

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Oke, tolong ini dong, dilebarin.*

**MENTERI BUMN RI (ERICK THOHIR):**

Izin Pimpinan, sebelum ditutup, kita serahkan laporan audit keuangan, konsolidasi,

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Oh iya, silakan.

**MENTERI BUMN RI (ERICK THOHIR):**

Iya, seluruh BUMN seperti yang diminta, karena ini sebelumnya belum pernah ada, tapi sesuai dengan komitmen transparansi *good corporate governance* dan keterbukaan, ini semua sudah ada. Mungkin saya bisa serahkan.

**(PENYERAHAN LAPORAN AUDIT KEUANGAN KEMENTERIAN BUMN)**

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Fotografer, mana? Rapat masih sekali lagi, nanti dari hasil-hasil Badan Anggaran, mungkin tanggal 11, ya? Eh 10, 10 September.

Baik, sekarang kita masuk ke *draft* kesimpulan, Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025, Senin, September 2024:

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI terkait realisasi anggaran, tolong *dibenerin* itu, sampai dengan Triwulan II tahun 2024.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI untuk meningkatkan realisasi anggaran tahun 2024, mengingat realisasi anggaran sampai Triwulan II baru mencapai Rp119,75 miliar atau 42,11% dari pagu anggaran Kementerian BUMN 2024 sebesar Rp284,4 miliar.

Setuju, Pak, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri BUMN RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-612 dan seterusnya, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Nomor B.480 dan seterusnya, di mana Pagu Anggaran Kementerian BUMN RI tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp277.498.437.000,00 dengan perincian:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp197.404.884.000,00,
  - b. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp80.093.553.000,00.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI terkait kinerja BUMN selama periode 2020-2023, baik dalam hal kontribusi dividen maupun penyerapan, Penyerapan Modal Negara (PMN).

Setuju? Penyerapan namanya itu ya, setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk segera menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh PT Indofarma Tbk dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Setuju, Pak?

**MENTERI BUMN RI (ERICK THOHIR):**

Izin, kalau berkenan, yang 66 miliar ditambahkan.

**F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):**

Itu masuk itu. tambahan anggaran.

**MENTERI BUMN RI (ERICK THOHIR):**

Komisi VI masih ...

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Oh, iya, iya. Coba diketik dulu. Nomor empat, nomor empat.

**F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):**

Penambahan anggaran Kementerian BUMN sebesar 66 tril, eh miliar.

**PESERTA RAPAT:**

Izin Pak, itu 66,64 miliar, Pak.

**F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):**

Tahun Anggaran 2025.

**F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A):**

Pimpinan, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Iya, Prof.

**F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A):**

Kalau boleh, kita minta bantuan, yang soal suplai gas industri nasional, 7 industri itu bisa dimasukkan, Pak. Kan selama ini kuotanya *dikurangin* terus. *Enggak*, alokasi kepmennya sudah, kepmennnya alokasi sudah, tapi PGN-nya menurunkan terus. Bukan, di, di Perindustrian, bukan di, di ESDM, yang Pak Bahlil, ini, bukan.

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Di mana, Pak?

**F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A):**

PGN ini.



**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Pak Wamen? Atau kita kasih waktu, *kan* tanggal 11 rapat lagi.

**F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A):**

Mohon dijawab, kenapa begitu?

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Iya.

**F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A):**

Karena ini menyangkut tujuh industri-industri.

**WAKIL MENTERI BUMN RI (KARTIKA WIRJOATMODJO):**

Belum tahu jawabannya, *musti* panggil.

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Pak Wamen belum tahu jawabannya. Dan, Pak Menteri, *kan* tanggal 11 kita rapat lagi. Nanti biar bisa di cari informasi di dalam dulu.

**F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A):**

*Eenggak*, ini tujuh industri, Pak.

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Paham, Pak. Maksudnya ini mungkin *kan* isunya harus diperdalam oleh, coba.

**WAKIL MENTERI BUMN RI (KARTIKA WIRJOATMODJO):**

Izin, izin, Pak Ketua, itu yang nomor 6, kalau boleh itu sedikit *dirubah*, "segera mendorong penyelesaian", Pak, karena bukan kami *kan* di pengoperasinya. "Segera mendorong penyelesaian permasalahan".

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Segera?

**WAKIL MENTERI BUMN RI (KARTIKA WIRJOATMODJO):**



Mendorong penyelesaian.

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Oh, mendorong penyelesaian. Maksudnya kenapa, Pak? Bapak *enggak* bisa menyelesaikan?

**WAKIL MENTERI BUMN RI (KARTIKA WIRJOATMODJO):**

Karena *kan* di korporasinya, Pak.

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Ha?

**WAKIL MENTERI BUMN RI (KARTIKA WIRJOATMODJO):**

Yang korporasinya, Pak, di korporasinya.

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Oh di korporasinya.

**WAKIL MENTERI BUMN RI (KARTIKA WIRJOATMODJO):**

Kita *kan* akan mendorong, tapi bukan kita yang menyelesaikan, nanti korporasi yang menyelesaikan, mendorong penyelesaiannya.

**KETUA RAPAT (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Oke*, meminta ya. *Oke*, tapi Bapak sepakat ya?

*Oke*, sebenarnya paling bagus, "Kementerian BUMN RI bersepakat untuk segera mendorong", nah itu lebih mengikat, nomor 6 itu, "bersepakat untuk segera", jadi *enggak* usah, "Komisi VI DPR RI meminta lagi", iya berkomitmen, langsung hapus, ya. *Oke*, jadi nomor empat kita ketok dulu ya.

4. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian BUM RI Tahun Anggaran 2025 sebesar 66,64 miliar untuk kebutuhan prioritas yang belum di *akomodir*.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**





Tadi nomor lima sudah.

6. Kementerian BUMN RI bersepakat dengan Komisi VI DPR RI untuk segera mendorong penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh PT Indofarma Tbk dan hak pensiunan pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Sepakat?

**(RAPAT: SETUJU)**

7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI.

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada saudara Menteri BUMN RI beserta jajarannya. Apakah ada *closing statement*, Pak? Baik, kalau tidak ada, demikian rapat kerja pada hari ini kami tutup.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.22 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

**DEWI RESMINI, S.E., M.Si.**  
NIP. 197104071992032001